



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
TAHUN 2019**

**DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN BANGKALAN  
2020**

## KATA PENGANTAR

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja, Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan selama tahun 2019 telah mendorong ditingkatkannya kualitas pelayanan aparatur secara umum. Peningkatan kualitas pelayanan ini diawali dengan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai yang tampak pada adanya kenaikan gaji secara bertahap pada setiap tahunnya dan penyelesaian masalah pegawai honorer dan tidak tetap lainnya. Peningkatan kesejahteraan ini diyakini merupakan pemicu bagi peningkatan kinerja pegawai secara umum. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, telah dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap kelembagaan yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang dianut. Berbagai langkah tersebut pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Setelah berbagai upaya penyempurnaan tersebut dilaksanakan, diharapkan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan mampu menunjukkan kinerjanya secara nyata sesuai dengan peran dan mandat yang diberikan kepadanya. Sudah saatnya diterapkan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kinerja aparatur. Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja ini juga berarti adanya tuntutan perubahan pola pikir dari aparatur itu sendiri.

Kita tidak ingin lagi ada instansi-instansi pemerintah yang tidak jelas kinerja dan pelayannya kepada masyarakat. Kita tidak menginginkan lagi adanya pimpinan-pimpinan instansi yang hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran tanpa menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka direspon secara positif oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan dengan menyusun laporan kinerja pemerintah sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten. Kita tentu mengharapkan kinerja pemerintah tampak dalam laporan tersebut, tidak sekedar kinerja penggunaan anggaran semata. Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2019 yang berarti Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan telah

menyelesaikan kegiatannya yang dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan Tahun 2018 - 2023 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan dalam upaya memenuhi Visi dan Misinya. Selama tahun 2019, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Dinas Perdagangan untuk tahun 2019 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, Januari 2020  
Kepala Dinas Perdagangan  
Kabupaten Bangkalan



**Drs. ROOSLI SOELIHARJONO, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19631010 199311 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
<hr/>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>01</b>
A. LATAR BELAKANG	01
B. MAKSUD DAN TUJUAN	03
C. DASAR HUKUM	03
D. GAMBARAN UMUM SKPD	04
E. ORGANISASI	05
F. SISTIMATIKA PENULISAN	07
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>08</b>
A. PERENCANAAN KINERJA	08
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>16</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	16
B. REALISASI ANGGARAN	21
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>28</b>

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan (LAKIP) Tahun 2019 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan selama tahun 2019 yang merupakan pelaksanaan amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan tahun 2019 ini tidak saja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja kegiatan, sasaran, dan target yang dicapai dengan menunjukkan hasil yang baik. Kedepan diharapkan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan dapat melakukan pengukuran terhadap kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan dari aparatur. Hasil pengukuran dapat dijadikan *Feed Back* dalam meningkatkan kinerja pelayanan tahun-tahun mendatang. Selain itu, LAKIP ini juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misinya, untuk Tahun 2019 ini dapat dikatakan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang "**baik**".

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi

secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.

Menyadari hal tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas dalam sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintah yang berfokus pada peningkatan Akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui instruksinya, Presiden dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah mengamanatkan pada setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan organisasi tersebut maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan 2019 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023.

Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan dibentuk berdasarkan : Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan nomor 57 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas perdagangan. Secara normatif, Dinas Perdagangan ini berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten bidang Perdagangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan adalah :

Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas dan Fungsi pelayanan pada Dinas Perdagangan banyak permasalahan – permasalahan dihadapi antara lain :

1. Efisiensi dan Efektifitas system distribusi barang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan penting, masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana perdagangan perkuatan kelembagaan usaha perdagangan, pengembangan jaringan informasi produk, pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat
2. Kurangnya optimalnya evaluasi / pengelolaan PAD ; belum terealisasi program dan kegiatan yang mendukung disebabkan keterbatasan anggaran untuk Dinas Perdagangan
3. Meningkatkan tertib niaga, tertipukur dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar
4. Penataan Pedagang kaki lima dan asongan dengan memfasilitasi lokasi usaha yang nyaman dan aman tertib dan indah karena pedagang kaki lima sebagai usaha kecil yang mampu memperluas lapangan kerja dan dapat berperan luas kepadamasyarakat dalam peningkatan pendapatan masyarakat
5. Sarana / prasarana dan Sumber Daya Manusia yang kurang memadai
6. Kurangnya kesadaran pegawai terhadap tanggungjawab kebersihan di wilayah pasar masing-masing
7. Kurang tertibnya masyarakat pasar untuk mengurus ijin sewa; di sebagian besar pasar pengurusan ijin perpanjangan masih sulit terealisasi secara keseluruhan diakibatkan kesadaran pengguna disaat masa pemakaiannya habis terkesan mengesampingkan aturan yang ada. Alasan yang sering muncul yaitu tidak adanya dana dan waktu yang cukup.
8. Banyaknya pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama masyarakat, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan di masa mendatang.

### **2. Tujuan**

Berdasarkan pertimbangan ini, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan 2017 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- 2.1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*).
- 2.2 Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi Masyarakat dan lingkungannya.
- 2.3 Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah.

## **C. DASAR HUKUM**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan.

#### **D. GAMBARAN UMUM PD**

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### **1. Kedudukan**

Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangkalan.

##### **2. Tugas**

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perdagangan.

##### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah bidang perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang perdagangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

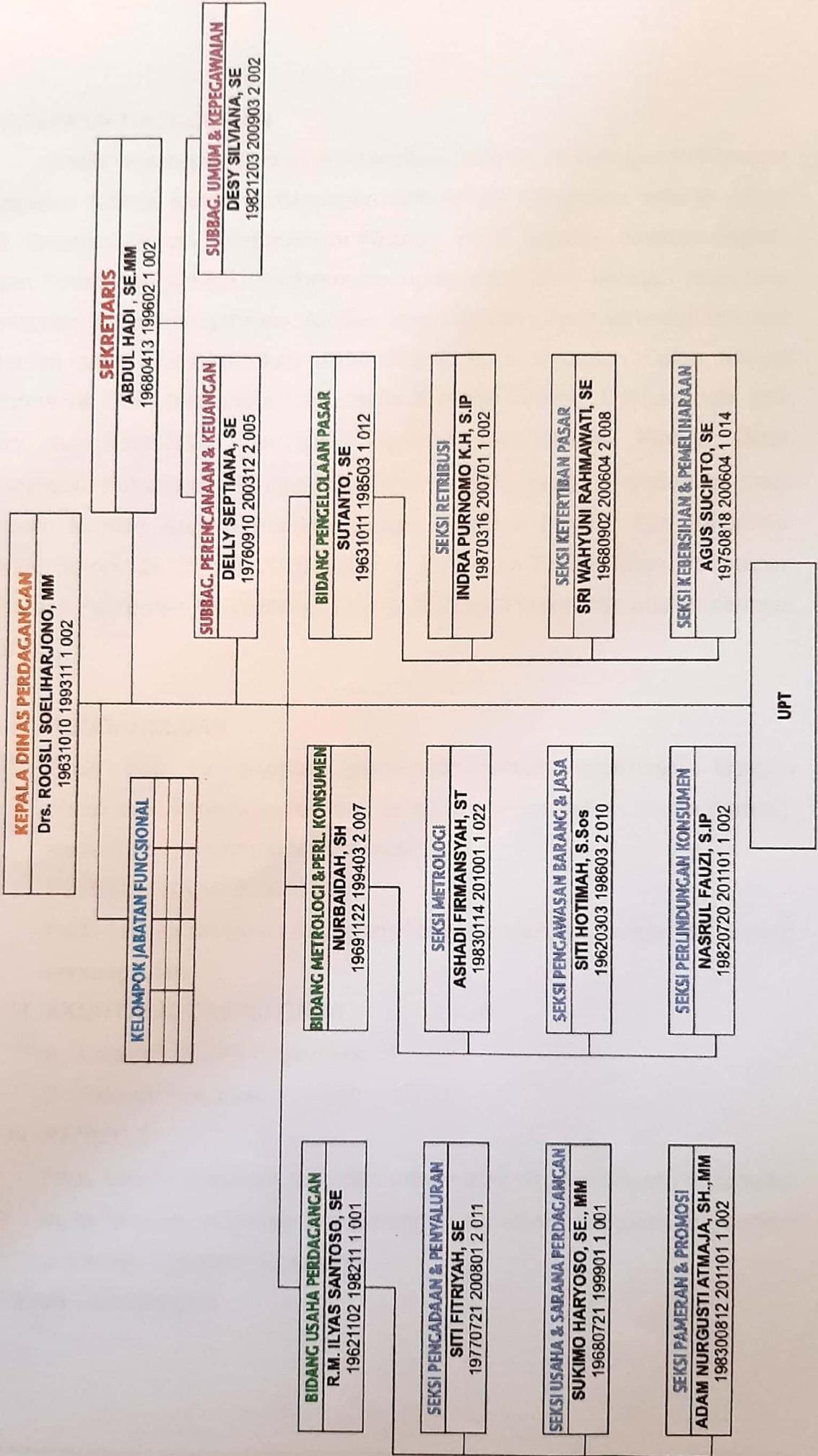
## E. ORGANISASI

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Usaha Perdagangan, membawahi:
  1. Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
  2. Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan;
  3. Seksi Pembinaan dan Promosi.
- d. Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen, membawahi ;
  1. Seksi Metrologi;
  2. Seksi Pengawasan Barang Beredar;
  3. Seksi Perlindungan Konsumen;
- e. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi :
  1. Seksi Retribusi;
  2. Seksi Ketertiban Pasar;
  3. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan;
- f. UPT
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- i. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- j. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang 'berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- k. Masing-masing Seksi dipirnpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepada Kepala Bidang.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada bagan berikut ini :

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKALAN



## **F. SISTIMATIKA PENULISAN**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan selama tahun 2019. Capaian Kinerja (*Performance Results*) 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah Celah Kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut ini :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategi serta permasalahan utama (*strategi issued*) yang sedang dihadapi organisasi

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Relisasi Anggaran

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN KINERJA

Sebagai Konsekuensi logis dari dinamika perubahan lingkungan yang begitu cepat dan tuntutan masyarakat maka Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan perlu mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Untuk itu diperlukan Visi sebagai cara pandang ke depan tentang kemana Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Visi Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan disusun berdasarkan kriteria – kriteria penulisan Visi, yaitu singkat, jelas, mudah diingat, menarik dan menantang.

#### 1. VISI

Adapun Visi Bupati Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG  
RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL”**

## 2. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Bangkalan sebagaimana dikemukakan diatas, Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan mengemban Misi ke 3 yaitu :

**“Menyelenggarakan Pelayanan Dasar Berkualitas Dan Tata Kelola Pemanfaatan Potensi Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”.**

## 3. TUJUAN

Tujuan merupakan Implementasi atau penjabaran dari pernyataan Misi dan merupakan *“result”* (hasil) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan atau gambaran kondisi yang ingin dicapai dimasa datang.

Adapun tujuan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan sesuai dengan sasaran RPJMD yaitu:

**“Meningkatnya Produktivitas Perdagangan”.**

## 4. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan pengertian tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan secara keseluruhan menetapkan 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan dengan indikator :
  - a. Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi
  - b. Nilai ekspor perdagangan dalam negeri
  - c. Persentase Jumlah UTTP yang di tera / tera ulang
2. Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan, dengan indikator:
  - a. Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan.

Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya ekonomi potensial daerah khususnya dalam bidang perdagangan	1. Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	1. Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur layak fungsi
		2. Nilai ekspor perdagangan dalam negeri

		3. Nilai SKM terhadap layanan pasar
		4. Persentase jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang
	2. Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan internal layanan kesekretariatan

Adapun sasaran dalam mencapai perencanaan strategik Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 adalah dengan menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN

1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2. Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah
3. Kegiatan Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah
4. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
5. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
6. Kegiatan Peningkatan Disiplin Pegawai
7. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
8. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Informasi Perangkat Daerah
9. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD
10. Kegiatan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan

11. Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kabupaten/Provinsi
2. PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
  1. Kegiatan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat
3. PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL BIDANG INFRASTRUKTUR
  1. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar
4. PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
  1. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
5. PROGRAM METEOROLOGI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
  1. Kegiatan Pengelolaan Kemetrologian
  2. Kegiatan Peningkatan Perlindungan Konsumen
  3. Pengadaan Peningkatan Pengawasan Barang dan Jasa
6. PROGRAM PENGELOLAAN PASAR
  1. Kegiatan Pengelolaan Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar
  2. Kegiatan Pengelolaan Retribusi Pasar
  3. Kegiatan Pengelolaan Penertiban Pasar
7. PROGRAM USAHA PERDAGANGAN
  1. Kegiatan Pengembangan Usaha dan Sarana Perdagangan
  2. Kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Promosi Usaha Perdagangan
  3. Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Usaha Perdagangan

## 8. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PASAR

1. Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat

## 5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan yang digunakan adalah sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKALAN**

NO.	Sasaran	Indikator	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	2 Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi		3	4	5	6	7	8	9
1.		Nilai SKM terhadap layanan pasar	$\frac{\text{Jumlah Infrastruktur Perdagangan yang diperbaiki}}{\text{Jumlah Seluruh Infrastruktur Perdagangan}} \times 100\%$	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	34.5
			Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Pasar	80	80	81	82	83	84	84

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk :

1. meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
2. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
3. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Perdagangan dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada akhir tahun 2019.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2019

Sasaran	Indikator	FORMULA	TARGET
1. Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	1. Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur layak fungsi	$\frac{\text{Jumlah Infra struktur Perdagangan yang diperbaiki}}{\text{Jumlah Seluruh Infrastruktur Perdagangan}} \times 100\%$	
	2. Nilai ekspor perdagangan dalam negeri	Berdasarkan data nilai ekspor yang telah dicapai	
	3. Nilai SKM terhadap layanan pasar	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pasar	
	4. Persentase jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	Berdasarkan jumlah alat UTTP yang sudah ditera/tera ulang	
2. Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan internal layanan kesekretariatan	Hasil survey kepuasan layanan internal kesekretariatan	

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berisikan tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh adanya evaluasi indikator-indikator kinerja yang ditunjukkan melalui pengukuran dan penilaian kinerja.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Inspektorat Kabupaten Bangkalan, maka telah ditetapkan standar pencapaian dengan skala sebagaimana tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 standart pencapaian kinerja

NO	Rentang Capaian	Kategori
1	Sangat baik	Lebih dari 100 %
2	Baik	75 % sampai 100
3	Cukup	55 % sampai 75
4	Kurang	Kurang dari 55 %

Untuk menganalisis terhadap hasil kinerja khusus pekerjaan fisik dinilai tercapai bila mencapai 100% dan tidak tercapai jika kurang dari 80%. Seperti telah diuraikan diatas, dari sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2019 sesuai

dengan rencana strategis 2018-2023 dapat dirinci lebih lanjut pada tabel sebagai berikut :

Hasil capaian kinerja beserta evaluasi tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	1. Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur layak fungsi	6,9 %	6,9 %	100 %
	2. Nilai ekspor perdagangan dalam negeri	6000 ton	6.603,85 ton	110,06 %
	3. Nilai SKM terhadap layanan pasar	80	81.79	102.23 %
	4. Persentase jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	222	217	97,74 %
2. Terpenuhinya pelayanan kesekretariat	Indeks kepuasan internal layanan kesekretariat	100	100	100 %

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara realisasi dengan target, semuanya tercapai dengan baik.

1. Pada sasaran strategis meningkatnya layanan daya saing sektor perdagangan menunjukkan pencapaian :

- 6,9 % dari target 6,9 % untuk indikator persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100 % (sangat baik)

- 6.603,85 ton dari target 6.000 ton untuk indikator nilai ekspor perdagangan dalam negeri sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100 % (sangat baik)
  - 81.79 dari target 80 untuk indikator nilai SKM terhadap layanan pasar sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100 % (sangat baik)
  - 217 alat uttp yang sudah ditera/tera ulang dari target 222 untuk indikator Persentase jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang sehingga persentase capaian kinerja sebesar 97,74 % (sangat baik)
2. Pada sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretariatan menunjukkan pencapaian Indeks kepuasa internal layanan kesekretariatan yang dicapai pada tahun 2019 sebesar 100%

**Tabel 3.3**

**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI CAPAIAN	
		2018	2019	2018	2019
1. Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	1. Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur layak fungsi	100 %	6,9 %	100 %	100 %
	2. Nilai ekspor perdagangan dalam negeri	-	6000 ton	-	6.603,85 ton
	3. nilai SKM terhadap layanan pasar	NA	80	-	81.79

	4. Persentase jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	-	100	-	97,74
2. Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan internal layanan kesekretariatan	-	100	-	100

Dari tabel 3.3 dapat dijelaskan yaitu :

1. Pada sasaran strategis meningkatnya layanan daya saing sektor perdagangan menunjukkan pencapaian :

- indikator persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi capaian kinerja antara 2018 dan 2019 semuanya tercapai dengan baik yaitu tercapai 100% sesuai dengan target yang sudah ditetapkan yaitu 3 pasar yang diperbaiki untuk tahun 2019 dari total 29 pasar yang ada di Kabupaten Bangkalan
- untuk indikator nilai ekspor perdagangan dalam negeri juga tercapai dengan baik yaitu dari target 6.000 ton terealisasi 6.603,85 ton dan ini adalah indikator baru jadi tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya
- untuk indikator nilai SKM terhadap layanan pasar juga tercapai dengan baik yaitu mempunyai nilai 81,79 dari target nilai 80, hal ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan mendapat apresiasi yang bagus dari masyarakat, tapi masih harus tetap ditingkatkan tiap tahunnya, dan ini merupakan indikator baru jadi tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- indikator persentase jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang pada tahun 2019 hanya 217 alat uttp yang sudah ditera/tera ulang atau mencapai 97,47% dari target yang ingin dicapai, dan ini juga merupakan indikator baru jadi tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2. Pada sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretariatan menunjukkan pencapaian Indeks kepuasa internal layanan kesekretariatan yang dicapai pada tahun 2019 sebesar 100% dan ini juga merupakan indikator baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Adapun untuk perbandingan realisasi kinerja tahun berkenaan sampai dengan akhir tahun rencana strategis (RENSTRA) Dinas perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target akhir RENSTRA	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Kemajuan
1. Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	1. Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur layak fungsi	34.48%	6.9%	20,01%
	2. Nilai ekspor perdagangan dalam negeri	6.200 ton	6.603,85 ton	106.51%
	3. nilai SKM terhadap layanan pasar	84	81.79	97.36%
	4. Persentase jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	100	97,74	97,74%
2. Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan internal layanan kesekretariatan	100	100	100%

Sebagaimana pada tabel 3.4, maka rata-rata tingkat kemajuan pencapaian indikator sasaran pada tahun 2019 terhadap sasaran akhir RENSTRA (2023) adalah hampir 100%. Selanjutnya apabila dibandingkan tingkat kemajuan

pencapaian pada masing-masing sasaran atau indikator sasaran, maka sasaran Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur layak fungsi, memiliki tingkat kemajuan pencapaian paling rendah yaitu 20.01%, tapi dipastikan pada akhir tahun renstra akan tercapai sesuai dengan target yang akan dicapai.

## B. REALISASI ANGGARAN

Untuk merealisasikan Target Kinerja Tahun 2019 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka Inspektorat Kabupaten Bangkalan melaksanakan 8 (delapan) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan sebagaimana Tabel 3.5 berikut :

**Tabel 3.5 Realisasi Anggaran**

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN /LOKASI	TOTAL PAGU	REALISASI KEUANGAN	
		( Rp)	( Rp)	%
1	2	3	4	5
I	<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>	<b>12,049,583,425</b>	<b>11,664,783,624</b>	<b>96.81</b>
1	PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN	11,559,420,825	11,219,307,791	97.06
2	KEDINASAN DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH	85,000,000	84,507,030	99.42
3	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	195,000,000	182,000,553	93.33
4	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	89,512,600	83,590,950	93.38
5	PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI	40,200,000	39,972,000	99.43
6	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	20,450,000	10,750,000	52.57
7	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN INFORMASI PERANGKAT DAERAH	30,000,000	16,089,050	53.63

8	MONITORING , EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	10,000,000	9,321,450	93.21
9	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	5,000,000	4,424,800	88.50
10	FASILITASI HARI JADI KABUPATEN/PROVINSI/NASIONAL	15,000,000	14,820,000	98.80
<b>II</b>	<b>Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal</b>	<b>175,000,000</b>	<b>133,806,463</b>	<b>76.46</b>
11	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	175,000,000	133,806,463	76.46
<b>III</b>	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</b>	<b>325,000,000</b>	<b>306,524,807</b>	<b>94.32</b>
12	FASILITASI BAGI USAHA MANDIRI MASYARAKAT	325,000,000	306,524,807	94.32
<b>IV</b>	<b>Program Meteorologi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>1,742,250,000</b>	<b>1,474,218,964</b>	<b>84.62</b>
13	PENGELOLAAN KEMETROLOGIAN	191,366,250	166,504,814	87.01
14	PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	25,000,000	23,200,100	92.80
15	PENINGKATAN PENGAWASAN BARANG DAN JASA	17,250,000	16,317,050	94.59
16	PENYEDIAAN SARANA DALAM MENDUKUNG PEMBENTUKAN UNIT METROLOGI LEGAL	1,508,633,750	1,268,197,000	84.06
<b>V</b>	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur</b>	<b>1,850,000,000</b>	<b>1,696,709,348</b>	<b>91.71</b>
17	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PEMELIHARAAN PASAR	1,850,000,000	1,696,709,348	91.71
<b>VI</b>	<b>Program Pengelolaan Pasar</b>	<b>2,337,491,675</b>	<b>2,301,974,142</b>	<b>98.48</b>
18	PENGELOLA KEBERSIHAN DAN PEMELIHARAAN PASAR	2,031,214,700	1,998,454,742	98.39
19	PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR	254,321,675	254,115,050	99.92

20	PENGELOLAAN PENERTIBAN PASAR	51,955,300	49,404,350	95.09
<b>VII</b>	<b>Program Usaha Perdagangan</b>	<b>480,699,900</b>	<b>446,218,898</b>	<b>92.83</b>
21	PENGEMBANGAN USAHA DAN SARANA PERDAGANGAN	399,487,400	368,587,598	92.27
22	PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PROMOSI	50,000,000	47,291,250	94.58
23	PENGADAAN DAN PENYALURAN USAHA PERDAGANGAN	31,212,500	30,340,050	97.20
<b>VIII</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Pasar</b>	<b>23,898,933,000</b>	<b>23,005,595,088</b>	<b>96.26</b>
24	PEMBANGUNAN / REVITALISASI PASAR RAKYAT	23,898,933,000	23,005,595,088	96.26
	<b>JUMLAH</b>	<b>42,858,958,000</b>	<b>41,029,831,334</b>	<b>95.73</b>

Dari Tabel 3.5 tersebut diatas untuk mewujudkan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan telah dianggarkan belanja langsung sebesar Rp. 42.858.958.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 41.029.831.334,- atau 95,73%.

Adapun alokasi anggaran per-sasaran tersaji pada Tabel 3.6 berikut :

**Tabel 3.6 Alokasi Anggaran per-sasaran**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran (Rp)	Anggaran (%)
1	Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	1. Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur layak fungsi	25.748.933.000,-	60,45
		2. Nilai ekspor perdagangan dalam negeri	980.699.900,-	2,3
		3. nilai SKM terhadap layanan pasar	2.337.491.675,-	5,48

		4. Persentase jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	1.742.250.000,-	4,09
2	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks kepuasan internal layanan kesekretariatan	12,049,583,425	28.29
<b>Jumlah Total</b>			<b>42,589,502,000</b>	<b>100</b>

Rencana alokasi anggaran pada masing-masing sasaran tersebut di atas, dalam pelaksanaan tahun 2018 telah dicapai kinerja dan anggaran sebagaimana penggunaan sumberdaya pada Tabel 3.7:

**Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran**

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1. Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	1. Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur layak fungsi	6.9	6.9	100%	25.748.933.000	24.702.304.436	95.9
	2. Nilai ekspor perdagangan dalam negeri	6.000 ton	6.603,85 ton	110,06 %	980.699.900	886.549.968	90.39
	3. nilai SKM terhadap layanan pasar	80	81.79	102.23 %	2.337.491.675	2.301.974.142	98.48
	4. Persentase jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	222	217	97,47%	1.742.250.000	1.474.218.964	84.61
2. Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks kepuasan internal layanan kesekretariatan	100%	100%	100%	12.049.583.425	11.664.783.624	96.8

**Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	1. Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	100	95.9	4.1
		2. Nilai ekspor perdagangan dalam negeri	110,06	90.39	19.67
		3. nilai SKM terhadap layanan pasar	102.23	98.48	3.75
		4. Persentase jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	97,47	84.61	12.86
2	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100	96.8	3.2

Berdasarkan penyajian data pada Tabel 3.7 dan Tabel 3.8 maka selanjutnya dapat dilakukan analisis sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya layanan daya saing sektor perdagangan dengan indikator :
  - a. persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi didukung oleh:
    1. Program Pembangunan Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur dengan kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan pasar
    2. Program Peningkatan Pengembangan Pasar dengan kegiatan pembangunan / revitalisasi pasar rakyat

Capaian kinerja pada indikator sasaran ini sebesar 100%, sedangkan capaian realisasi anggaran 95,5%, sehingga tingkat efisiensi sumber daya sebesar 4.1%

- b. Nilai ekspor perdagangan dalam negeri didukung oleh
1. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dengan kegiatan Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran
  2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan kegiatan Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri dan masyarakat
  3. Program Usaha Perdagangan dengan kegiatan :
    - Pengembangan usaha dan sarana perdagangan
    - Peningkatan pembinaan dan promosi
    - Pengadaan dan penyaluran usaha perdagangan

Capaian kinerja pada indikator sasaran ini sebesar 110,06%, sedangkan capaian realisasi anggaran 90,39%, sehingga tingkat efisiensi sumber daya sebesar 19,67%

- c. Nilai SKM terhadap layanan pasar didukung oleh Program Pengelolaan Pasar dengan kegiatan:
1. Pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar
  2. Pengelolaan retribusi pasar
  3. Pengelolaan penertiban pasar

Capaian kinerja pada indikator sasaran ini sebesar 102,23%, sedangkan capaian realisasi anggaran 98.48%, sehingga tingkat efisiensi sumber daya sebesar 3,75%

- d. Persentase jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang didukung oleh Program Metrologi dan Perlindungan Konsumen dengan kegiatan:
1. Pengelolaan Kemetrologian
  2. Peningkatan perlindungan konsumen
  3. Peningkatan pengawasan barang dan jasa

Capaian kinerja pada indikator sasaran ini sebesar 97,47%, sedangkan capaian realisasi anggaran 84,61%, sehingga tingkat efisiensi sumber daya sebesar 12,86%

2. Pada sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretariatan didukung oleh program pelayanan kesekretariatan pada kegiatan:
  - a. Penyediaan barang dan jasa perkantoran
  - b. Kedinasan dalam daerah dan luar daerah
  - c. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
  - d. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
  - e. Peningkatan disiplin pegawai
  - f. Penyusunan perencanaan dan informasi perangkat daerah
  - g. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  - h. Penyusunan pelaporan keuangan
  - i. Fasilitasi hari jadi kabupaten/ kota/propinsi

Capaian kinerja pada indikator sasaran ini adalah 100% sedangkan capaian realisasi anggaran 96,8%, sehingga efisiensi sumber daya sebesar 3,2%

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan merupakan wujud pertanggungjawaban dalam Pencapaian Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan dan RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2019 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektivitas dan efisiensi program dengan kebijakan yang ditetapkan.

Pada tahun 2019 Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator sasaran. Dari 2 (dua) sasaran tersebut berdasarkan analisis kinerja diketahui Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan telah mendapatkan capaian yang berhasil.

Harapan kami agar dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan Tujuan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan.